

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Merrynce dan Ahmad Hidir

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract: Effectiveness of Family Planning Programme Implementation. The purpose of this study is to investigate and analyze the factors that influence the effectiveness of the implementation of family planning programs in the Middle District of Kuantan Kuantan District Singingi. This research was conducted in the Central District of Kuantan Kuantan District Singingi, where the informant research is that BPMPKB implementers and beneficiaries of the program is public. Data collected by interview and observation techniques, after the data was collected and then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results show the effectiveness of the implementation of family planning programs in the Middle District of Kuantan Kuantan District Singingi is quite effective. While the dominant factor affecting the effectiveness of the implementation of family planning programs is the factor of communication and resource factors.

Abstrak: Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana pada Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana yang menjadi informan penelitian adalah pelaksana program yaitu BPMPKB dan penerima program yaitu masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup efektif. Sedangkan faktor yang dominan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program KB adalah faktor komunikasi dan faktor sumber daya.

Kata Kunci: Efektivitas, implementasi kebijakan, dan program KB.

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang kependudukan lebih diarahkan pada upaya pengembangan sumber daya manusia agar penduduk makin menjadi kekuatan yang efektif dan produktif bagi pembangunan. Dalam upaya ini diusahakan ditingkatkan keterpaduan dan koordinasi upaya pengendalian kelahiran dengan berbagai kegiatan pembangunan lainnya, khususnya upaya pembangunan dibidang kesehatan, transmigrasi, pengendalian urbanisasi, pendidikan, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Usaha penurunan tingkat pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian, terutama kematian bayi dan anak. Upaya pengendalian kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana (KB). Sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat luas KB bertujuan mengatur kelahiran anak dan meningkatkan ke-

sejahteraan ibu. Selanjutnya upaya penurunan tingkat kematian dilaksanakan dengan memperluas dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Dari pengalaman selama hampir lima Repelita ini nyata sekali bahwa dalam melaksanakan upaya pembangunan kependudukan peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan.

Dalam upaya melaksanakan program KB, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan beban tugasnya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Dimana berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, tugas BPMPKB adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.

Dengan adanya tugas dan fungsi yang luas, BPMPKB harus bisa merealisasikannya dengan maksimal. Salah bidang tugas yang diembankan kepada BPMPKB adalah bidang keluarga berencana. Dimana dalam pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, BPMPKB berkoordinasi dengan BKKBN. Sehingga setiap program bidang keluarga berencana yang dilaksanakan merupakan program yang dilakukan oleh BKKBN. Salah satunya seperti yang diamanahkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/1940/SJ tentang intensifikasi pengelolaan program KB.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa intensifikasi pengelolaan program KB di Kabupaten Kuantan Singingi sebenarnya masih berjalan kurang baik. Jumlah KK yang telah mengikuti program KB sudah cukup banyak dari tahun 2010 dan tahun 2011, namun kenyataannya juga bahwa KK yang belum mengikuti program KB di Kabupaten Kuantan Singingi masih cukup besar. Fakta ini yang membuat BPMPKB harus lebih giat mensosialisasikan pelaksanaan program KB di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karenanya amanah yang diberikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, masih belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang maksimal dari BPMPKB untuk bisa memberikan informasi yang jelas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tentang penting dan bermanfaatnya mengikuti program KB. Sebab dengan adanya strategi pelaksanaan program yang jelas, diharapkan setiap masyarakat dapat memahami pentingnya mengikuti program KB. Selain itu juga pemahaman yang baik akan mendukung setiap masyarakat untuk bisa menyusun rencana keluarganya dan upaya menciptakan keluarga yang sejahtera.

Salah satu wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi yang juga membutuhkan perhatian pelaksanaan program KB adalah Kecamatan Kuantan Tengah. Kecamatan Kuantan Tengah merupakan kecamatan yang terletak di Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar ketiga setelah Kecamatan Kuantan Mudik dan Keca-

matan Hulu Kuantan. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menginspirasi betapa pentingnya masyarakat untuk mengikuti program KB yang diajarkan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah peserta KB yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah juga masih belum maksimal.

Masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah yang belum menggunakan program KB masih banyak sekali, artinya dari jumlah KK yang besar masih ada sebagian besar yang tidak ikut program KB. Seperti pada tahun 2011 dari 12.476 KK hanya 6.931 yang ikut program KB dan 2.363 tidak ikut program KB. Realita ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah masih cukup rendah. Apalagi jumlah masyarakat yang tidak mengikuti program KB semakin didukung dengan angka kelahiran yang setiap tahunnya meningkat. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak pelaksana program KB untuk lebih giat mensosialisasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang betapa bermanfaatnya mengikuti program KB dalam menyusun tingkat pendapatan keluarga yang sejahtera. Selain itu juga dari data yang diperoleh bahwa masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah yang mengikuti program KB lebih cenderung menggunakan alat KB seperti pil dan suntikan. Kecenderungan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah menggunakan alat KB berbentuk pil dan suntikan disebabkan alat ini lebih praktis dan mudah digunakan, hanya saja dibutuhkan rutinitas penggunaannya dalam jangka waktu tertentu.

Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Gibson et. Al (1996), pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas. Namun bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program KB pada Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan (*deskriptif*) dan menjelaskan (*explanatory atau confirmatory*) tentang fenomena yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana efektivitas pelaksanaan program KB dan keluarga sejahtera di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Program KB

Dalam penelitian tentang efektivitas pelaksanaan program KB pada Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti akan mengkaji dan membahasnya berdasarkan teorinya Ripley and Franklin. Sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, peneliti menggunakan teorinya Edward III. Secara kajian teoritis implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan program-program pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimana dengan

adanya penilaian ini diharapkan kajian yang dilakukan tentang efektivitas pelaksanaan kebijakan dapat memberikan kontribusi dan dampak yang positif bagi sasaran kebijakan dan pelaksana kebijakan.

1. Kepatuhan (*Compliance*) Birokrasi

Kepatuhan implementor dalam efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana sudah berjalan dengan cukup baik. Dimana implementor yang patuh akan tujuan dan sasaran pelaksanaan program serta tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan program. Kepatuhan akan tujuan dan sasaran yang dilakukan jelas diwujudkan untuk merealisasikan keluarga yang berkualitas dan wanita yang memiliki keinginan untuk mengikuti program keluarga berencana. Sebab menciptakan keluarga yang berkualitas merupakan upaya untuk memiliki generasi-generasi muda yang produktif dalam segala bidang. Salah satu pendukungnya adalah kekuatan ekonomi keluarga untuk bisa membiayai seluruh kehidupan anak agar menjadi anak yang berkualitas. Dimana apabila satu keluarga hanya memiliki anak sesuai anjuran dari program keluarga berencana, diharapkan kekuatan ekonomi keluarga yang dimiliki dapat mewujudkan anak-anak yang berkualitas. Sehingga fakta ini juga akan menghilangkan persepsi masyarakat umumnya bahwa "*banyak anak banyak rezeki*".

Dari data yang diperoleh bahwa di Kecamatan Kuantan Tengah dari tahun 2007 – 2011 jumlah peserta KB meningkat cukup banyak, walaupun dari angka kelahiran juga meningkat dalam setiap tahunnya. Fakta ini menjelaskan bahwa kemauan dan kepedulian masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah untuk mengikuti program KB sudah mulai meningkat, tetapi bila dibandingkan dengan jumlah KK yang ada masih ada 50 % lagi masyarakat yang belum mengikuti program KB. Kondisi inilah yang membuat angka kelahiran masih belum dapat ditekan dan masih tinggi. Hal ini membuat BPMPKB sebagai pelaksana program KB harus memiliki komitmen bersama untuk segera memberikan penjelasan dan pemaparan kepada 50 % KK yang belum mengikuti program KB, agar memiliki keinginan

untuk ikut program KB. Walaupun pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan akan terbentur dengan pembiayaan dan tenaga penyuluh yang dimiliki. Namun BPMPKB harus bisa memanfaatkan anggaran yang dimiliki untuk memaksimalkan program penyuluhan dan sosialisasi yang akan dilakukan, dalam upaya memberikan pemahaman dan penjelasan akan program KB.

Walaupun sebenarnya kekurangan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPMPKB diakui oleh masyarakat, tetapi setidaknya implementor harus memiliki skala prioritas pada setiap kecamatan untuk bisa mengikuti penyuluhan dan sosialisasi tentang program KB. Namun demikian pun, pihak implementor harus siap untuk menghadapi ketidakpedulian masyarakat atau keacuhan masyarakat akan sosialisasi dan penyuluhan yang akan dilakukan tentang program KB. Apalagi prioritas masyarakatnya adalah masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, yang tentunya sedikit sulit merubah *frame* berfikirnya untuk bisa mengikuti program KB. Karena apabila ada kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh pihak implementor, masyarakat selalu memiliki alasan tertentu untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Misalnya saja alasan sibuk mengurus pekerjaan yang dimilikinya, seperti membantu suami menyadap karet, memanen sawit dan sebagainya.

Oleh karena itu hendaknya pihak implementor harus bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan seperti ini, agar pelaksanaan program yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Tetapi dari hasil informasi yang diperoleh bagi kaum wanita yang berada disekitar Kota Teluk Kuantan yang merupakan ibukotanya Kecamatan Kuantan Tengah, mereka sudah sangat peduli dengan program KB. Sebab mereka telah menginginkan memiliki keluarga yang berkualitas dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki. Sehingga banyak kaum wanita yang melahirkan disekitar wilayah Kota Teluk Kuantan juga sudah meminta bantuan jasa dokter ahli kandungan atau bidan. Setelah proses kelahiran berjalan dengan lancar, mereka pun langsung mengikuti program KB dengan memiliki alat

kontrasepsi yang paling cocok dan relevan. Pemahaman kaum wanita ini diperoleh melalui media elektronik dan media massa yang tersedia sebagai penjelas terhadap pentingnya program KB bagi kaum wanita dan keluarga dimasa-masa yang akan datang.

2. Kelancaran Prosedur Rutinitas

Kelancaran prosedur rutinitas dalam melaksanakan program KB sudah dilakukan dengan cukup baik. Buktinya penyusunan rencana dalam melaksanakan program ini dilakukan, bahkan proses evaluasi juga dilakukan oleh implementor untuk bisa menemukan formula yang tepat dalam mengimplementasikan program KB di Kabupaten Kuantan Singingi. Namun kendala penyediaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan program KB membuat banyak tantangan dan halangan untuk bisa mengimplementasikan program ini dengan maksimal. Sehingga sangat wajar saja apabila dari data sekunder yang diterima tentang masyarakat yang mengikuti program KB di Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat kecil selagi.

Kabupaten Kuantan Singingi itu memiliki jumlah penduduk \pm 47.882 jiwa, namun yang baru mengikuti program KB hanya 6.931 jiwa. Fakta data yang ditemukan hanya sekitar 14,5 % masyarakat yang mengikuti program KB. Sehingga dapat membuktikan bahwa pelaksanaan program KB yang dilakukan oleh BPMPKB masih belum maksimal. Karena masih banyak masyarakat yang tidak menginginkan untuk ikut dalam program KB yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Rendahnya respon masyarakat untuk mengikuti program KB memang tidak semata-mata karena kurangnya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh BPMPKB kepada masyarakat di setiap kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi. Namun masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya program KB dalam menciptakan keluarga yang berkualitas. Selain itu juga faktor rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan program KB membuat mereka enggan untuk

mengikuti program ini dengan baik. Sehingga masyarakat kurang memperdulikan pelaksanaan program KB yang dicanangkan oleh pemerintah.

Kemudian apabila ditinjau dari tingkat perekonomian yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah sebagai locus penelitian, sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan. Semenjak masyarakat mulai menjadikan perkebunan karet dan sawit sebagai mata pencaharian utama. Karena untuk saat ini memiliki perkebunan karet dan sawit sangat membantu perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah juga menjadi alasan bagi masyarakat untuk kurang peduli terhadap program KB yang dilaksanakan. Karena program KB ini menawarkan keluarga yang berkualitas dengan memiliki anak hanya cukup dua saja. Tetapi masyarakat yang tetap mengikuti budaya masih banyak yang menginginkan punya anak lebih dari dua, sehingga sulit untuk ikut serta dalam program KB yang dilaksanakan. Realita ini banyak terjadi kepada ibu-ibu yang lebih senior dan tinggal desa, serta jauh dari informasi tentang program KB.

Ketidaktahuan yang dimiliki oleh masyarakat ini membuat mereka enggan mengikuti program KB yang dilaksanakan oleh BPMPKB. Sehingga kecenderungan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah yang mengikuti program KB adalah para ibu-ibu muda yang sudah banyak memperoleh informasi program KB dari media yang tersedia. Ditambah lagi adanya keinginan para ibu-ibu muda untuk mempersiapkan anaknya menjadi yang terbaik dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki. Sebab banyak ibu-ibu muda ini berpemikiran kedepannya persaingan untuk memperoleh sesuatu sangat ditentukan oleh kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya itu mereka harus bisa mempersiapkan anak-anak mereka menjadi salah satu yang terbaik dengan memenuhi kebutuhan pendidikannya. Salah satunya dengan melakukan perencanaan kepemilikan anak dalam keluarga, agar bisa menyusun keluarga yang berkualitas. Realita inilah yang membuat banyak ibu-ibu

muda mengikuti program KB yang dilaksanakan, agar bisa mempersiapkan keluarga yang berkualitas.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program KB

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana penelitian ini mengambil teorinya Edward III yang memaparkan bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi. Untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor tersebut selanjutnya akan dideskripsikan satu persatu.

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam menyampaikan program KB kepada masyarakat masih rendah atau belum efektif. Karena masih banyak para wanita-wanita yang sudah layak mengetahui tentang program KB masih belum banyak yang memperoleh informasi tentang program KB tersebut. Kalaupun ada yang mengetahui tentang adanya program KB, mereka mendapat informasinya dari teman atau media yang mereka baca, bukan dari petugas pelaksana program KB yang ada ditingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan. Faktor rendahnya komunikasi yang dilakukan disebabkan oleh ketersediaan tenaga penyuluh yang sedikit, sehingga sulit untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah, terutama wilayah pedesaan.

Sedikitnya tenaga penyuluh yang dimiliki oleh BPMPKB tidak terlepas dari kurangnya penerimaan aparatur baik dari lingkup pegawai negeri sipil ataupun honorer. Fakta ini membuat lembaga pelaksana program KB yaitu BPMPKB yang ditugaskan untuk melaksanakan program KB sulit untuk mengkomunikasikan program ini kepada masyarakat. Oleh karenanya upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana program KB dalam mensiasati keterbatasan tenaga penyuluh, maka komunikasi yang dilakukan guna me-

nyampaikan informasi tentang program KB kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan di kecamatan ataupun puskesmas kecamatan. Selebihnya penyebaran informasi dan sosialisasi tentang program KB dilakukan melalui penyebaran brosur atau leaflet kepada setiap puskesmas dan prosyandu guna memberikan informasi tentang pelaksanaan program KB.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh BPMPKB dalam melaksanakan program KB masih rendah sekali. Sumber daya yang minimal dimiliki oleh BPMPKB terfokus kepada SDM penyuluh, anggaran pelaksanaan program KB dan peralatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program KB, seperti alat-alat kontrasepsi. Keterbatasan SDM penyuluh memang menjadi halangan utama bagi pihak implementor dalam menyampaikan informasi tentang program KB yang harus diikuti oleh masyarakat, khususnya kaum wanita. Keterbatasan ini tidak terlepas dari ketiadaannya pelamar-pelamar kerja yang masuk, baik melalui jalur PNS atau honorer yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga penyuluh KB. Padahal proses rekrutmen sudah dilakukan dalam beberapa waktu, namun rendahnya minat dari pihak pelamar untuk menjadi tenaga penyuluh KB membuat formasi ini jarang diminati oleh pelamar. Kalaupun ada peminatnya biasanya hanya dijadikan titik awal sebagai seorang PNS atau honorer untuk menjajaki titik-titik yang lain. Fakta ini sebenarnya harus segera disadari oleh pihak lembaga pelaksana program KB bahwa rendahnya kepemilikan SDM penyuluh tidak terlepas dari kurang pelamar dari sektor tersebut. Oleh karenanya pihak lembaga pelaksana harus sudah mencari solusinya dengan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait untuk bisa melaksanakan program KB ini kepada seluruh masyarakat.

Kerjasama kerja bisa dilakukan terutama dengan Dinas Kesehatan dan RSUD yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana melalui kerjasama ini, pihak BPMPKB, Dinas Kesehatan dan RSUD menyusun program

bersama dalam upaya melaksanakan program KB yang akan diimplementasikan. Langkah lain yang bisa dilakukan dalam upaya memperoleh tenaga penyuluh yang handal, dengan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu PKK yang dimiliki ditingkat desa. Dimana setiap ibu-ibu aparaturnya desa diberikan pelatihan tentang pelaksanaan program KB oleh pihak BPMPKB, Dinas Kesehatan dan RSUD, sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB tersebut ditingkat desa. Sehingga apabila pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan, maka secara otomatis BPMPKB sudah memiliki tambahan tenaga penyuluh di setiap desa secara relawan. Artinya masyarakat desa dapat memperoleh informasi dari setiap ibu-ibu aparaturnya desa yang sudah dilatih tentang pelaksanaan program KB yang benar dan tepat. Sementara pihak BPMPKB hanya tinggal melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KB tersebut di tingkat desa.

3. Disposisi (Sikap)

Implementor program KB sudah cukup mampu menunjukkan sikap atau disposisi yang baik kepada penerima program yaitu masyarakat dan khususnya kaum wanita. Artinya pelaksana program KB sudah memiliki disposisi atau sikap pelaksana sesuai yang diharapkan oleh penerima program, dengan menunjukkan respon dan daya tanggap yang cukup tinggi terhadap setiap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pihak penerima program. Kemampuan pelaksana program menunjukkan sikap seperti ini dikarenakan memiliki pemahaman yang baik akan pelaksanaan program KB yang dijalankan. Walaupun tidak seluruh personil pelaksana yang memiliki pemahaman yang baik, setidaknya dari sebahagian besar implementor yang ada sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap pelaksanaan program KB. Sehingga apabila ada keluhan yang datang dari masyarakat khusus kaum wanita yang diterima oleh pihak pelaksana, dengan cepat pelaksana akan merespon keluhan-keluhan yang diterima. Sebab merespon keluhan yang disampaikan merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi

oleh masyarakat khususnya kaum wanita. Oleh karenanya apabila pelaksana program memiliki daya tanggap atau respon yang cukup tinggi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh penerima program, tentunya akan memberikan solusi akan hambatan-hambatan pelaksanaan program.

Untuk mampu merespon setiap keluhan dan permasalahan yang dihadapi dibutuhkan pemahaman yang baik dari setiap personil pelaksana program KB. Maka dari itu kejelasan arahan dan perintah yang diberikan oleh pembuat kebijakan menjadi modal dasar bagi para pelaksana program untuk bisa memahami setiap langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam melaksanakan program. Selain itu juga dalam menunjukkan sikapnya pada proses implementasi program KB, hindari prasangka yang negatif kepada para penerima program. Apabila prasangka negatif sudah berkembang akan mendorong kegagalan dalam proses implementasi program KB yang dikerjakan. Oleh sebab itu untuk menghindari prasangka ini dibutuhkan intensitas para pelaksana dalam merespon kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penerima program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan program KB sudah tersedia dengan baik. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan program KB. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap lembaga akan memberikan kemudahan bagi lembaga untuk mengerjakan tugasnya. Walaupun sebenarnya kelembagaan yang bersentuhan langsung dengan penerima program KB adalah kelembagaan ditingkat daerah yaitu BPMPKB yang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan program KB untuk masyarakat. Tetapi sebenarnya BPMPKB bisa melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang memiliki peran dan fungsi yang hampir sama

dalam melaksanakan program KB untuk masyarakat. Misalnya saja dengan Dinas Kesehatan, melalui lembaga ini program KB dapat disosialisasikan dan diinformasikan sampai ke tingkat desa. Sebab Dinas Kesehatan memiliki cabang pembantu di setiap kecamatan, yaitu puskesmas yang secara langsung bisa mensosialisasikan program ini kepada kecamatan. Bahkan puskesmas juga bisa mendelegasikan tugas sosialisasi dan memberikan informasi ini kepada lembaga yang ada dibawahnya seperti posyandu. Sebab posyandu merupakan lembaga kesehatan yang terdekat dengan masyarakat yang ada di desa, tentunya cukup mudah untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan program KB.

SIMPULAN

Efektivitas pelaksanaan program KB di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup efektif. Dimana pihak implementor program KB sudah cukup memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan dan cukup mematuhi prosedur rutinitas yang ditetapkan dalam pelaksanaan program KB. Kepatuhan implementor ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan program KB yang ditetapkan. Walaupun upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan menemui hambatan dalam menanamkan keyakinan kepada masyarakat betapa pentingnya mengikuti program KB. Faktor yang dominan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program KB adalah faktor komunikasi dan faktor sumber daya. Dimana faktor komunikasi memberikan pengaruh yang signifikan bagi proses penyampaian informasi dan keterangan tentang pentingnya program KB bagi masyarakat, khusus kaum perempuan yang merupakan ibu-ibu rumah tangga. Sebab dengan adanya informasi yang diberikan tentang program KB, maka masyarakat akan bisa mengikuti program tersebut dengan benar sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki.

Kemudian faktor sumber daya sebagai pengaruh dalam efektivitas pelaksanaan program KB menitikberatkan dalam ketersediaan SDM penyuluh KB, anggaran pelaksanaan program dan fasilitas alat KB yang dimiliki. Terbatasnya SDM penyuluh menjadi hambatan utama dalam upaya menyampaikan informasi pada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiman, Nashir. 2001. *Pengantar Kebijakan Publik*. Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Hassel, Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Balairung & Co, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Zaeni Akhmad. 2006. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang: Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Gringsing". *Tesis.*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.